



**PENGARUH GANGGUAN PRIBADI DAN GANGGUAN EKSTERN
TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR PADA BPK
PERWAKILAN SUMATERA UTARA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

**IRWAN SASMIKA
NPM : 09 833 0030**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2013**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

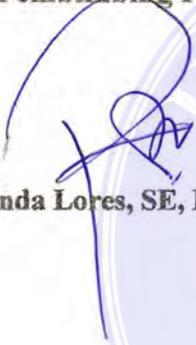
JUDUL : PENGARUH GANGGUAN PRIBADI DAN GANGGUAN EKSTERN TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR PADA BPK PERWAKILAN SUMATERA UTARA MEDAN

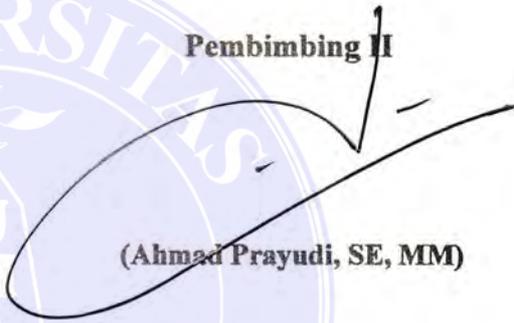
NAMA : IRWAN SASMIKA

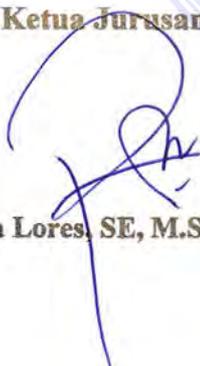
NPM : 09 833 0030

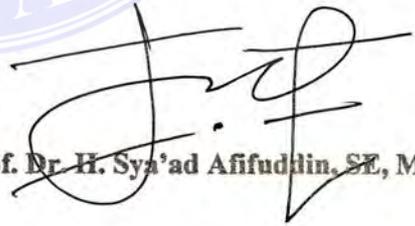
JURUSAN : AKUNTANSI

**Menyetujui :
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

(Linda Lores, SE, M.Si)

Pembimbing II

(Ahmad Prayudi, SE, MM)

Ketua Jurusan

(Linda Lores, SE, M.Si)

Dekan

(Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, M.Ec)

Tanggal Lulus : 2014

ABSTRAK

Penelitian ini adalah gangguan ekstern bagi organisasi auditor yang dapat membatasi pelaksanaan pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan auditor dalam menyatakan pendapat atau simpulan hasil pemeriksaannya secara independen dan objektif. Instrumen untuk mengukur variabel ini menggunakan 8 *item* pernyataan untuk mengukur persepsi para responden mengenai pengaruh gangguan ekstern dengan empat poin skala *Likert* dengan meminta responden menunjukkan pilihan antara sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju dari pernyataan yang diajukan.

Hasil statistik deskriptif dari jawaban responden atas variabel gangguan ekstern pada tabel 4.3 menunjukkan rata-rata (*mean*) sebesar 24,65 dengan standar deviasi 4,39. Rata-rata responden menjawab pada skala 3 atas pernyataan yang diajukan. Mayoritas jawaban tersebut menunjukkan bahwa gangguan ekstern berpengaruh terhadap independensi auditor pada BPK Perwakilan Sumatera Utara.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Medan Area. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa di dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini di sebabkan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu untuk kesempurnaan Skripsi ini penulis mengharapkan saran, kritik dan perbaikan dari pembaca yang sifatnya konstruktif.

Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan serta dorongan semangat dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, MEc selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
2. Bapak Hery Syahrial, SE, Msi selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
3. Ibu Linda Lores, SE, MSi selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

4. Ibu Linda Lores, SE, MSi selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya, guna membimbing penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Prayudi SE, MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya guna membimbing penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staff fakultas ekonomi yang telah mengajar dan membantu penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan.
7. Bapak Pimpinan BPK RI Medan yang telah membantu penulis dalam memberikan data dan informasi demi terwujudnya skripsi ini.
8. Buat Istri tercinta dan Anakku tersayang, Semoga Menjadi anak yang berbakti kepada Ayah dan Ibu amiin.
9. Teristimewa kepada ayahanda dan ibunda yang dengan penuh kasih sayang telah mengasuh, mendidik, membimbing serta dengan do'a restunya penulis berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke perguruan tinggi.
10. Ucapakan terima kasih buat teman-teman Jurusan Akuntansi dan seluruh teman – teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dan bagi penulis khususnya. Amin.....

Medan, 2013
Penulis

(IRWAN SASMIKA)



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Tinjauan Pustaka	8
1. Pengertian Gangguan Diri	8
2. Pengertian Gangguan Eksternal'	11
3. Independensi Auditor	14
B. Hasil Penelitian Terdahulu.....	17
C. Kerangka Konseptual	20
D. Hipotesis.....	21
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	22
B. Populasi dan Sampel.....	23
C. Definisi Operasional.....	24

D. Jenis dan Sumber Data.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Teknik Analisis Data	26

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	32
B. Pembahasan.....	40

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Konseptual	20
Gambar IV.1. Struktur Organisasi BPK RI	36



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel III.1	Rencana Waktu Penelitian	23
Tabel IV.1	Statistik Deskriptif Variabel Gangguan Pribadi.....	41
Tabel IV.2	Statistik Deskriptif Variabel Gangguan Ekstern.....	42





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para pengguna laporan audit mengharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu jasa profesional yang independen dan objektif. Banyaknya kasus perusahaan yang "jatuh" karena kegagalan bisnis yang dikaitkan dengan kegagalan auditor, hal ini mengancam kredibilitas laporan keuangan. Ancaman ini selanjutnya mempengaruhi persepsi masyarakat, khususnya pemakai laporan keuangan atas kualitas audit.

Kualitas audit ini penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Seperti yang dikemukakan oleh Arens *et al.* (1986) yaitu "alasan mengapa begitu banyak pihak yang menggantungkan kepercayaan mereka mengenai kebenaran laporan keuangan berdasarkan laporan auditor adalah karena harapan mereka mendapatkan suatu pandangan yang tidak memihak". Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi masyarakat tergantung pada bagaimana sikap independensi yang dimiliki oleh seorang auditor. Sehingga organisasi auditor dan auditornya harus memiliki dan melaksanakan aturan-aturan, prosedur, dan aplikasi yang memadai agar independensi tetap terjaga.

Sedangkan dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik (2001) seksi 220 PSAK No. 04 Alinea 02 menyebutkan “auditor harus bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal berpraktik sebagai auditor intern)”. Akuntan publik merupakan auditor independen pada perusahaan komersial, sedangkan auditor pada sektor pemerintahan, yaitu BPK selaku auditor eksternal dan BPKP selaku auditor internal. Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII pasal 23 ayat 5 tentang hal keuangan menyatakan bahwa “untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.

Hasil pemeriksaan itu diberitabukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Auditor pemerintah yang harus mengaudit laporan keuangan pemerintah yang di dalamnya mencakup audit terhadap semua kegiatan pemerintah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara yang meliputi pelaksanaan APBN, APBD, pelaksanaan anggaran tahunan BUMN dan BUMD atau badan hukum lain dimana terdapat kepentingan keuangan negara atau yang menerima bantuan pemerintah. Luasnya cakupan yang harus diaudit dan adanya karakteristik khusus dalam audit sektor pemerintahan, maka diperlukan auditor-auditor yang handal, yangn memiliki kompetensi, integritas, objektivitas, dan independensi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pekerjaan yang dilaksanakannya. Isu mengenai prinsip etika profesi akuntan publik terutama yang terkait masalah independensi merupakan salah satu isu yang selalu menjadi sorotan masyarakat.

Terjadinya kasus–kasus kegagalan auditor berskala besar seperti kasus Enron di Amerika Serikat, Kimia Farma di Indonesia, telah menimbulkan sikap skeptis masyarakat menyangkut ketidakmampuan profesi akuntan publik dalam menjaga independensinya. Sorotan tajam diarahkan pada perilaku auditor dalam berhadapan dengan klien yang dipersepsikan gagal dalam menjalankan perannya sebagai auditor independen. Dalam kasus Andersen pada *Enron Corporation* diketahui terjadinya perilaku *moral hazard* diantaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor. Ini merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran etika profesi auditor yang terjadi di Amerika Serikat, sebuah negara yang memiliki perangkat undang-undang bisnis dan pasar modal yang lebih lengkap.

Hal ini terjadi akibat keegoisan satu pihak terhadap pihaklain, dalam hal ini pihak-pihak yang selama ini diuntungkan atas penipuan laporan keuangan terhadap pihak yang telah tertipu. Hal ini disebabkan karena ketidakjujuran, kebohongan atau dari praktik bisnis yang tidak etis yang berakibat hutang dan sebuah kehancuran yang menyisakan penderitaan bagi banyak pihak serta proses peradilan dan tuntutan hukum. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 7 nMaret 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lampiran II, Pernyataan Standar Umum Kedua pada alinea empat belas menyebutkan: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi auditor dan auditor, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi

independensinya”. Ketiga gangguan tersebut, yaitu gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi harus dihindari oleh auditor agar independensi tetap terjaga.

Jika satu atau lebih dari gangguan tersebut mempengaruhi auditor secara individu, menurut peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 7 Maret 2007 tersebut, auditor sebaiknya menolak penugasan pemeriksaan. Jika tidak, maka hal tersebut harus dimuat dalam bagian lingkup pada laporan hasil pemeriksaan.

Gangguan pribadi adalah gangguan yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi mungkin mengakibatkan auditor membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya. Sedangkan gangguan ekstern adalah gangguan ekstern bagi organisasi auditor yang dapat membatasi pelaksanaan pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan auditor dalam menyatakan pendapat atau simpulan hasil pemeriksaannya secara independen dan objektif. Gangguan organisasi terhadap independensi auditor dapat dipengaruhi oleh kedudukan, fungsi, dan struktur organisasinya.

Auditor yang ditugasi oleh organisasi auditor dapat dipandang bebas dari gangguan terhadap independensi secara organisasi, apabila ia melakukan pemeriksaan di luar entitas tempat ia bekerja. Standar Pemeriksaan ini berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan serta fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Standar Pemeriksaan ini berlaku untuk BPK dan akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, untuk dan atas nama BPK. Selain itu, standar pemeriksaan ini dapat digunakan oleh aparat pengawas intern pemerintah

termasuk satuan pengawasan intern maupun pihak lainnya sebagai acuan dalam menyusun standar pengawasan sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Salah satu penelitian yang mencoba menguji pengaruh gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi terhadap independensi pemeriksa yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2009). Penelitian tersebut menguji pengaruh gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi terhadap independensi auditor baik secara simultan maupun parsial. Analisis empiris penelitiannya didasarkan pada survey data dari seluruh staf Inspektorat Kabupaten Deli Serdang yang berjumlah 41 orang. Hasil utama penelitian tersebut yaitu pertama, Siregar menemukan bahwa secara simultan gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi berpengaruh terhadap independensi pemeriksa. Kedua, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi berpengaruh terhadap independensi pemeriksa. Tetapi yang memiliki pengaruh terbesar terhadap independensi auditor adalah gangguan organisasi. Dan ketiga, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 78% variabel independensi pemeriksa dipengaruhi oleh gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi, sedangkan 22% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Oleh karena itu, penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan Siregar (2009). Namun ada perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu mengenai objek penelitian dan variabel independen yang digunakan. Objek dalam penelitian ini yaitu auditor pada Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Sumatera Utara. sedangkan objek penelitian pada penelitian sebelumnya yaitu pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Dengan demikian, terdapat perbedaan persepsi antara auditor yang bekerja di Inspektorat

dengan yang bekerja di BPK, misalnya dipengaruhi oleh faktor budaya etnis, budaya organisasi, regulasi, dll. Variabel independen yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen, yaitu gangguan pribadi dan gangguan ekstern. Penelitian ini tidak menggunakan variabel gangguan organisasi disebabkan auditor tidak memiliki kedudukan dalam struktur organisasi pemerintahan. Sehingga dapat dipastikan diteliti atau tidak, gangguan organisasi tidak akan berpengaruh pada auditor. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti kembali hal tersebut dan membandingkan hasil yang diperoleh dari penelitian sebelumnya dengan hasil penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh gangguan pribadi dan gangguan ekstern terhadap independensi auditor pada BPK Perwakilan Sumatera Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Apakah gangguan pribadi dan gangguan ekstern berpengaruh terhadap independensi auditor secara simultan?
2. Apakah gangguan pribadi dan gangguan ekstern berpengaruh terhadap independensi auditor secara parsial?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Mengetahui pengaruh secara simultan dari gangguan pribadi dan gangguan ekstern terhadap independensi auditor.
2. Mengetahui pengaruh secara parsial dari gangguan pribadi dan gangguan ekstern terhadap independensi auditor.

D. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk menambah wawasan, terutama mengenai pengaruh gangguan pribadi dan gangguan ekstern terhadap independensi auditor.
- b. Bagi praktisi, sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak BPK Perwakilan Sumatera Utara mengenai pengaruh gangguan pribadi dan gangguan ekstern terhadap independensi auditor dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
- c. Bagi pihak lainnya, sebagai referensi tambahan bagi pihak yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh gangguan pribadi dan gangguan ekstern terhadap independensi auditor.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Gangguan pribadi

Gangguan yang bersifat pribadi merupakan suatu keadaan dimana auditor secara individual tidak dapat untuk tidak memihak, atau dianggap tidak mungkin tidak memihak. Gangguan yang bersifat pribadi ini dapat berlaku bagi auditor secara individual dan juga dapat berlaku bagi organisasi/lembaga audit.

Menurut Siegel dan Marconi dalam Suartana (2010) seharusnya auditor terlepas dari faktor-faktor personalitas dalam melakukan audit. Personalitas akan bisa menyebabkan kegagalan audit sekaligus membawa risiko yang tinggi bagi auditor. Untuk itu, risiko inheren dalam audit harus diperhitungkan dengan baik. Ada dua tipe berperilaku yang dihadapi oleh auditor:

- a. Auditor dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap lingkungan audit. Misalnya ketika menilai pengendalian intern yang diterapkan oleh perusahaan. Perusahaan besar dianggap memiliki pengendalian intern yang memadai padahal belum tentu demikian.
- b. Auditor harus menyelaraskan dan sinergi dalam pekerjaan mereka, karena audit hakikatnya adalah pekerjaan kelompok, sehingga perlu ada proses *review* di dalamnya. Interaksi ini akan banyak menimbulkan proses berperilaku dan sosial. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan

Negara, menyatakan bahwa organisasi auditor harus memiliki sistem pengendalian mutu intern untuk membantu menentukan apakah auditor memiliki gangguan pribadi terhadap independensi.

Organisasi auditor perlu memperhatikan gangguan pribadi terhadap independensi petugas pemeriksanya. Gangguan pribadi dari auditor secara individu meliputi antara lain:

- a. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa atau sebagai pegawai dari entitas yang diperiksa, dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap entitas atau program yang diperiksa.
- b. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas atau program yang diperiksa.
- c. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
- d. Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang diperiksa.
- e. Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan obyek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/atau mereviu laporan keuangan entitas atau program yang diperiksa.

- f. Adanya prasangka terhadap perorangan, kelompok, organisasi atau tujuan suatu program, yang dapat membuat pelaksanaan pemeriksaan menjadi berat sebelah.
- g. Pada masa sebelumnya mempunyai tanggung jawab dalam pengambilan keputusan atau pengelolaan suatu entitas, yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan atau program entitas yang sedang berjalan atau sedang diperiksa.
- h. Memiliki tanggung jawab untuk mengatur suatu entitas atau kapasitas yang dapat mempengaruhi keputusan entitas atau program yang diperiksa, misalnya sebagai seorang direktur, pejabat atau posisi senior lainnya dari entitas, aktivitas atau program yang diperiksa atau sebagai anggota manajemen dalam setiap pengambilan keputusan, pengawasan atau fungsi monitoring terhadap entitas, aktivitas atau program yang diperiksa.
- i. Adanya kecenderungan untuk memihak, karena keyakinan politik atau sosial, sebagai akibat hubungan antar pegawai, kesetiaan kelompok, organisasi atau tingkat pemerintahan tertentu.
- j. Pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang auditor, yang sebelumnya pernah sebagai pejabat yang menyetujui faktur, daftar gaji, klaim, dan pembayaran yang diusulkan oleh suatu entitas atau program yang diperiksa.
- k. Pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang auditor, yang sebelumnya pernah menyelenggarakan catatan akuntansi resmi atas entitas/unit kerja atau program yang diperiksa.
- l. Mencari pekerjaan pada entitas yang diperiksa selama pelaksanaan pemeriksaan. Djumadi (2000) dalam Feronika (2006) menjelaskan bahwa

prinsip independensi dapat hilang atau tercederai antara lain oleh beberapa hal berikut:

1. Selama masa pelaksanaan audit sampai laporan audit atau selama periode laporan keuangan yang diperiksa, ia (termasuk keluarga sedarah garis lurus dan semenda) atau kantor akuntan publiknya (KAP) terikat komitmen untuk mengelola sebagian besar aset kliennya.
2. Mempunyai kerjasama kepemilikan usaha lain dengan kliennya atau setiap staf karyawan kunci atau manajemen perusahaan kliennya.
3. Mempunyai hubungan hutang piutang dalam segala bentuk dengan staf karyawan kunci atau manajemen perusahaan kliennya.
4. Mempunyai hubungan saudara, langsung atau tidak langsung dengan kliennya.

1. Pengertian Gangguan Ekstern

Gangguan yang bersifat ekstern bagi organisasi/lembaga audit dapat membatasi pelaksanaan audit atau mempengaruhi kemampuan auditor dalam menyatakan pendapat dan kesimpulan auditnya secara independen dan obyektif. Menurut Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lampiran II pada Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 01 Standar Umum menyebutkan, independensi dan obyektifitas pelaksanaan suatu pemeriksaan dapat dipengaruhi gangguan ekstern, apabila terdapat :

- a. Campur tangan atau pengaruh pihak ekstern yang membatasi atau mengubah lingkup pemeriksaan secara tidak semestinya.
- b. Campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan prosedur pemeriksaan atau pemilihan sampel pemeriksaan.

- c. Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian suatu pemeriksaan.
- d. Campur tangan pihak ekstern mengenai penugasan, penunjukan, dan promosi auditor.
- e. Pembatasan terhadap sumber daya yang disediakan bagi organisasi auditor, yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan organisasi auditor tersebut dalam melaksanakan pemeriksaan.
- f. Wewenang untuk menolak atau mempengaruhi pertimbangan auditor terhadap isi suatu laporan hasil pemeriksaan.
- g. Ancaman penggantian petugas auditor atas ketidaksetujuan dengan isi laporan hasil pemeriksaan, simpulan auditor, atau penerapan suatu prinsip akuntansi.
- h. Pengaruh yang membahayakan kelangsungan auditor sebagai pegawai, selain sebab-sebab yang berkaitan dengan kecakapan auditor atau kebutuhan pemeriksaan.

Menurut Boynton *et al.* (2003:22), kepentingan klien harus dipenuhi dengan kompetensi dan perhatian profesional. Dan kepada anggota profesi lainnya, auditor memiliki suatu tanggung jawab untuk meningkatkan suatu reputasi profesi dan kemampuannya untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, keputusan untuk menerima klien audit baru atau melanjutkan hubungan dengan klien yang telah ada tidak boleh dianggap remeh. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa, seperti identifikasi pembatasan ruang lingkup. Auditor harus mempertimbangkan apakah manajemen telah melanggar batasanbatasan dalam

melaksanakan prosedur audit. Jika manajemen mencegah kunjungan ke lokasi-lokasi tertentu yang dianggap material oleh auditor, atau membatasi hubungan dengan konsumen atau pemasok tertentu, auditor harus mempertimbangkan apakah tindakan-tindakan tersebut menyebabkan diterbitkannya pendapat wajar tanpa pengecualian.

Alternatif lainnya, auditor akan ditugaskan setelah akhir tahun, atau pertimbangan waktu lain yang menyebabkan auditor tidak dapat mengaplikasikan prosedur audit yang dianggap perlu dalam pelaksanaan audit. Auditor juga harus mempertimbangkan implikasi dari menerima suatu perikatan jika kertas kerja auditor terdahulu tidak tersedia untuk di-review. Ketidakmampuan untuk me-review kertas kerja auditor terdahulu akan menyulitkan auditor dalam memahami hal-hal yang mendukung saldo audit awal. Salah satu dari kondisi-kondisi tersebut dapat mempengaruhi keputusan akhir auditor berkenaan dengan sifat pendapat auditor. Selanjutnya Boynton *et al.* (2003) mengemukakan bahwa sumber daya entitas tidak terbatas pada sumber daya keuangan saja. Terdapat lima kategori sumber daya organisasi, yaitu: sumber daya keuangan, sumber daya berdasarkan aktiva, sumber daya manusia, sumber daya informasi, dan sumber daya tidak berwujud. Pope (2003) mengemukakan bahwa agar bisa efektif, auditor harus bebas dari tekanan klien atau lembaga yang sedang diaudit. Klien auditor negara adalah legislatif atau parlemen, dan pejabat publik yang bertanggung jawab atas anggaran publik. Sayangnya, kantor auditor negara biasanya mudah ditekan oleh kliennya. Seperti terjadi dalam sebagian besar kasus selama ini, eksekutif:

- a. Mengangkat auditor Negara
- b. Menetapkan sumber daya bagi kantor auditor Negara
- c. Menetapkan jumlah staf persyaratan penerimaan mereka
- d. Memegang tanggung jawab atas seluruh pengelolaan dan tata usaha keuangan melalui Kementerian Keuangan Seorang auditor negara yang tidak dilindungi oleh undang-undang dasar dapat dipecat dengan sewenang-wenang oleh pemerintah yang merasa dirugikan olehnya sebagian besar pemerintah yang mendapat kritik tajam karena pengelolaan keuangan yang buruk cenderung menembak pembawa pesan daripada mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Agar peranan kantor auditor negara benar-benar independen dan berlandaskan undang-undang dasar, maka kantor itu dan fungsi-fungsinya harus bertanggung jawab pada dan diperiksa secara berkala oleh legislatif (di beberapa negara, melalui Komisi Anggaran). Kantor itu harus dapat dengan mudah menghubungi Parlemen, Komisi Anggaran, Penuntut Umum, dan badan-badan auditor lainnya, jika diperlukan. Selain itu, praktik terbaik menunjukkan bahwa kantor auditor negara sebaiknya juga dinilai oleh rekan-rekannya untuk mempertahankan mutu, melalui pemeriksaan oleh pihak luar dan audit.

2. Independensi Auditor

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada pihak lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam diri auditor dalam

merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Karena independensi merupakan sikap atau keadaan pikiran, maka independensi sulit diperlihatkan secara objektif; hanya tindakan auditor yang dapat dipakai oleh pengamat untuk mengevaluasi independensinya. Walaupun independensi mengharuskan bahwa seorang auditor harus jujur secara intelektual, auditor hanya dapat memperlihatkan independensinya dengan senantiasa bebas dari kewajiban atau kepentingan dalam informasi keuangan klien dan penyusun serta pemakai serta informasi keuangan (Simamora, 2002). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dalam Lampiran II menyebutkan: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi auditor dan auditor, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”. Akuntan publik harus senantiasa mempertahankan sikap mental independen. Dengan demikian, akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun, sebab bilamana tidak demikian halnya, maka bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya (IAI, 2008: 17). Salah satu peraturan pada Kode Perilaku Profesional AICPA membahas mengenai independensi, sebagaimana yang tertuang dalam Boynton *et al.* (2003: 106) yaitu: ***“seorang CPA yang berpraktik publik harus bersikap independen dalam melaksanakan jasa profesional sebagaimana diisyaratkan oleh standar resmi yang diumumkan oleh badan-badan yang ditunjuk oleh Dewan”***.

Supriyono (1988: 20) menyatakan bahwa terdapat lima hal yang menjadi dasar pentingnya independensi akuntan publik, yaitu.

1. Independensi merupakan syarat yang sangat penting bagi profesi akuntan publik untuk menilai kewajaran informasi yang disajikan oleh manajemen kepada pemakai informasi.
2. Independensi diperlukan oleh akuntan untuk memperoleh kepercayaan dari klien dan masyarakat, khususnya para pemakai laporan keuangan.
3. Independensi diperlukan agar dapat menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen.
4. Jika akuntan publik tidak independen, maka pendapat yang dia berikan tidak mempunyai arti atau tidak mempunyai nilai.
5. Independensi merupakan martabat penting akuntan publik yang secara berkesinambungan perlu dipertahankan.

Abdul Halim (2001: 21) membagi independensi akuntan publik dalam tiga aspek, yaitu.

1. *Independence in fact* (independensi dalam fakta)
2. *Independence in appearance* (independensi dalam penampilan)
3. *Independence in competence* (independensi dari sudut keahlian atau kompetensinya).

Berdasarkan definisi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Independence in fact*, artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, keterkaitan yang erat dengan objektivitas.

- b. *Independence in appearance*, artinya pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Auditor harus menjaga kedudukannya sedemikian rupa sehingga pihak lain akan mempercayai sikap independensi dan objektivitasnya. Meskipun auditor telah menjalankan audit dengan baik secara independen dan objektif, pendapat yang dinyatakan melalui laporan audit tidak akan dipercaya oleh para pemakai jasa auditor independen bila ia tak mampu mempertahankan independensi dalam penampilan.
- c. *Independence in competence*, artinya auditor yang awam dalam *electronic data processing system* tidak memenuhi independensi keahlian bila ia mengaudit perusahaan yang pengolahan datanya menggunakan sistem informasi terkomputerisasi. Independensi dari sudut pandang keahlian terkait erat dengan kecakapan profesional auditor.

Arifin dkk (2003: 9) menyebutkan empat hal yang dapat mempengaruhi independensi seorang auditor dari segi penampilan, yaitu.

1. Akuntan publik adalah direktur atau pejabat perusahaan klien
2. Auditor memberikan *management advisory service* dan kemudian mengauditnya.
3. Akuntan publik memberikan jasa akuntansi dan melaksanakan auditnya.
4. Bila *fee* akuntan publik sebagian besar tergantung dari hanya 1 klien.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

- a. **Iwan Pantas Siregar (2009)** melakukan penelitian mengenai Pengaruh Gangguan Pribadi, Eksternal, dan Organisasi terhadap Independensi Auditor

(studi empiris pada Inspektorat Kabupaten Deli Serdang). Hasil penelitiannya menunjukkan.

1. Penelitian ini mampu memberikan bukti empiris bahwa secara simultan menunjukkan bahwa gangguan pribadi, ekstern dan organisasi berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,78 yang menunjukkan bahwa 78% variabel (independensi) dapat dijelaskan oleh variabel independen gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi.
2. Secara parsial gangguan pribadi, ekstern dan organisasi masing-masing berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor, tetapi yang memiliki pengaruh terbesar terhadap independensi auditor adalah gangguan organisasi.

b. Feronika dan Wirawan Suhaedi (2006) melakukan penelitian mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penampilan Akuntan Publik dengan hasil sebagai berikut. 67,31% responden cenderung berpendapat bahwa ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien dapat mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik. 58,78% responden cenderung berpendapat bahwa pemberian jasa lain selain jasa audit tidak mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik. 58,78% responden cenderung berpendapat bahwa lamanya hubungan audit tidak mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik 71,62% responden cenderung berpendapat bahwa persaingan antar KAP tidak mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik 62,17% responden cenderung berpendapat bahwa ukuran kantor akuntan publik, besar atau kecil, tidak mempengaruhi independensi penampilan akuntan

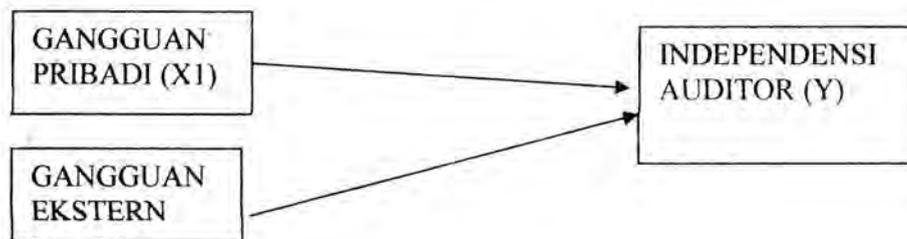
publik. 68,75% responden berpendapat bahwa besarnya audit fee tidak mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik.

c. **Fariad (2010)** melakukan penelitian mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Auditor (studi survei pada KAP di Makassar) dengan

hasil:

1. Secara parsial, hubungan keluarga dengan klien menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap sikap etis auditor. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya hubungan antara keluarga dengan klien dan auditor belum cukup mendorong berubahnya tingkat independensi seorang auditor.
2. *Fee* atas jasa profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi auditor.
3. Pemberian barang dan jasa (*gifts*) dan fasilitas dari klien menunjukkan pengaruh negatif terhadap independensi auditor.
4. Pelaksanaan jasa lain kepada klien audit menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap independensi auditor.
5. Secara simultan, variabel hubungan keluarga, *fee* atas jasa profesional, pemberian barang atau jasa dari klien, dan pelaksanaan jasa lain untuk klien audit berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor.

C. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1

Kerangka Teoritis Penelitian

Sebagaimana disebutkan pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lampiran II Pernyataan Nomor 01 Standar Umum menyatakan “ada dua faktor gangguan yang dapat mempengaruhi independensi auditor yaitu gangguan yang bersifat pribadi, gangguan yang bersifat ekstern”. Sehingga kerangka konsep penulis dalam penelitian ini adalah Independensi Auditor (sebagai variabel dependen) dipengaruhi oleh gangguan pribadi, dan eksternal (sebagai variabel independen). Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian tentang Pengaruh Gangguan Pribadi dan gangguan Ekstern terhadap Independensi Auditor pada BPK Perwakilan Sumatera Utara.

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah.

1. Terdapat pengaruh secara simultan dari gangguan pribadi dan gangguan ekstern terhadap independensi auditor.
2. Terdapat pengaruh secara parsial dari gangguan pribadi dan gangguan ekstern terhadap independensi auditor.





BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, lokasi dan waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah asosiatif, menurut Sugiyono (2008 : 11), penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas x terhadap variabel terikat y dan seberapa eratnya pengaruh atau hubungan itu.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BPK Perwakilan Sumatera Utara yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol Nomor 22, Medan

3. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Oktober 2012 sampai dengan Januari 2013.

Tabel 3.1
Rencana Waktu Penelitian

No	Keterangan	Okt'2012				Nov' 2012				Des' 2012				Jan' 2013			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pengajuan Judul																
2	Konsultasi / Bimbingan																
3	Pembuatan dan Seminar Proposal																
4	Pengumpulan Data																
5	Analisis Data																
6	Penyusunan & Bimbingan Skripsi																
7	Pengajuan dan Sidang Meja Hijau																

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini yang meliputi seluruh staf auditor pada: Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara yang berjumlah 79 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Sampel yang dipilih dari populasi dianggap mewakili keberadaan populasi. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah cara penarikan sample yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti (Kuntjojo, 2009: 35). Menurut Amirin (2009), *purposive sampling* adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan

persyaratan sampel yang diperlukan. Dalam bahasa sederhana *purposive sampling* itu dapat dikatakan sebagai secara sengaja mengambil sampel tertentu (jika orang maka berarti orang-orang tertentu) sesuai persyaratan (sifat-sifat, karakteristik, ciri, kriteria) sampel. Berdasarkan metode tersebut maka kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Responden tidak dibatasi oleh jabatan auditor pada BPK (partner, senior, atau junior auditor) sehingga semua auditor yang bekerja di BPK perwakilan Sumatera utara dapat diikutsertakan sebagai responden.
2. Responden dalam penelitian ini adalah auditor pada BPK Perwakilan Sumatera Utara.

C. Defenisi Operasional

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu gangguan pribadi (X1) dan gangguan ekstern (X2) dan satu variabel dependen yaitu independensi auditor (Y). Gangguan pribadi (X1) adalah gangguan yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi mungkin mengakibatkan auditor membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya. Gangguan ekstern (X2) dalam penelitian ini adalah gangguan ekstern bagi organisasi auditor yang dapat membatasi pelaksanaan pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan auditor dalam menyatakan pendapat atau simpulan hasil pemeriksaannya secara independen dan objektif. Independensi auditor (Y) dalam penelitian ini adalah organisasi auditor dan auditor harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden berupa jawaban terhadap kuesioner.

E. Metoda Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yaitu dengan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak didalam perusahaan.
2. Daftar pertanyaan, yaitu data yang didapatkan dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada responden. Menurut Sugiyono (2008 : 199), "Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya".

F. Teknik Analisis Data

1. Model Analisis Data

Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (*Multiple Linear Regression Analysis*). Purbayu (2005) mengemukakan bahwa korelasi berganda adalah hubungan dari beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Jika suatu variabel dependen bergantung pada lebih dari satu variabel independen, hubungan kedua variabel

tersebut disebut analisis regresi berganda (Sulaiman, 2004: 80). Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan : Y : Independensi Auditor.

X_1 : Gangguan Pribadi.

X_2 : Gangguan Ekstern.

α : Konstanta.

β : Koefisien Regresi.

e : Error.

2. Teknik Analisis Data

Uji Kualitas Data

Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian

tidak akan berguna jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tidak memiliki *reability* (tingkat keandalan) dan *validity* (tingkat kebenaran/keabsahan yang tinggi). Pengujian pengukuran tersebut masing-masing menunjukkan konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan. Pengujian validitas dan reabilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*).

a. Uji Validitas

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrument pengukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (Purbayu, 2005: 247). Uji

validitas ditujukan untuk mengukur seberapa nyata suatu pengujian atau instrument. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar. Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistic yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode *Product Moment Pearson Correlation*. Data dinyatakan valid jika nilai *r*-hitung yang merupakan nilai dari *Corrected Item-Total Correlation* > dari *r*-tabel pada signifikansi 0.05 (5%).

b. Uji Reabilitas

Reabilitas adalah ukuran yang menunjukkan konsistensi dari alat ukur dalam mengukur gejala yang sama di lain kesempatan (Purbayu, 2005: 251). Reabilitas suatu variabel yang dibentuk dari daftar pertanyaan dikatakan baik jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > dari 0,60.

c. Uji Normalitas

Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji ini merupakan uji yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistik parametik. Penggunaan uji normalitas karena pada analisis statistik parametik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Maksud data terdistribusi secara normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal. Distribusi normal data dengan bentuk distribusi normal di mana data memusat pada nilai rata-rata dan median (Purbayu, 2005: 231). Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi *SPSS for Windows* untuk pengujian terhadap data sampel tiap variabel. Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilihat melalui output grafik histogram grafik

kurva normal *p-p plot*. Menurut Ghozali (2009: 147) salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram, hal ini akan menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih andal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan *plotting* dari data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Uji Asumsi Klasik Untuk memperoleh hasil/nilai yang tidak bias atau estimator linear tidak bias yang terbaik (*Best Linear Unbiased Estimator/ BLUE*), maka model regresi harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut dengan asumsi klasik. Asumsi klasik tersebut, yaitu:

a. Multikolinearitas

Asumsi multikolinearitas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Gejala multikolinearitas adalah gejala korelasi antarvariabel independen. Gejala ini ditunjukkan dengan korelasi yang signifikan antarvariabel independen. Apabila terjadi gejala multikolinearitas, salah satu langkah untuk memperbaiki model adalah dengan menghilangkan variabel dari model regresi, sehingga bisa dipilih model yang paling baik (Purbayu, 2005: 238). Sulaiman (2004: 89), multikolinearitas berarti ada hubungan linear yang

“sempurna” (pasti) di antara beberapa atau semua variabel independen dari model regresi.

Menurut Ghozali (2009: 95) multikolinearitas dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya, (2) *Variance Inflation Factor (VIF)*. Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* ≤ 10 .

b. Heterokedastisitas

Asumsi heterokedastisitas adalah asumsi dalam regresi dimana varians dari residual tidak sama untuk suatu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam regresi, salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah bahwa varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak sama antar satu varians dari residual. Gejala varians yang tidak sama ini disebut gejala heterokedastisitas, sedangkan adanya gejala residual yang sama dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain disebut dengan homokedastisitas, salah satu uji untuk menguji heterokedastisitas ini adalah dengan melihat penyebaran dari varians residual (Purbayu, 2005: 242). Diagnosis adanya heterokedastisitas dapat dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu grafik *scatterplot*. Bila grafik penyebaran nilai-nilai prediksi tidak membentuk suatu pola tertentu, seperti meningkat atau menurun, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis regresi linear yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh gangguan pribadi dan gangguan ekstern sebagai variabel independen

terhadap independensi auditor sebagai variabel dependen. Untuk menguji hipotesis mengenai gangguan pribadi dan gangguan ekstern secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor, digunakan pengujian hipotesis secara simultan dengan uji F dan secara parsial dengan uji t.

a. Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi dalam penelitian ini menggunakan alpha 5% atau 0,05 maka hasil uji F dapat dihitung dengan bantuan program SPSS pada tabel ANOVA. Hasil uji F menunjukkan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, jika *p-value* (pada kolom *sig.*) lebih kecil dari *level of significant* yang ditentukan (sebesar 5 %), atau F hitung (pada kolom F) lebih besar dari F tabel. F tabel dihitung dengan cara $df_1 = k-1$, dan $df_2 = n-k$, dimana k adalah jumlah variabel dependen dan variabel independen, dan n adalah jumlah responden atau jumlah kasus yang diteliti.

b. Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi dalam penelitian ini menggunakan alpha 5% atau 0,05 maka hasil uji t dapat dihitung dengan bantuan program SPSS dapat dilihat pada tabel t hitung (tabel *Coefficients*). Nilai dari uji t hitung dapat dilihat dari *p-value* (pada kolom *Sig.*) pada masing-masing variabel independen, jika *p-value* lebih kecil dari *level of*

significant yang ditentukan atau *t* hitung (pada kolom *t*) lebih besar dari *t* tabel (dihitung dari *two-tailed* $\alpha = 5\%$ *df-k*, *k* merupakan jumlah variabel independen), maka nilai variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh gangguan pribadi dan gangguan ekstern terhadap independensi auditor pada Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Sumatera Utara.. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut.

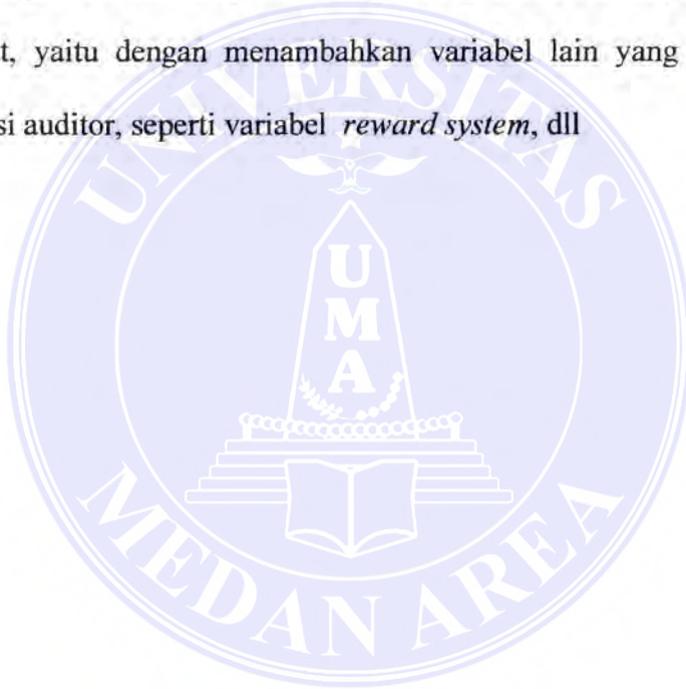
1. Hasil pengolahan data dengan regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara simultan gangguan pribadi (X1) dan gangguan ekstern (X2) berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor (Y).
2. Hasil pengolahan data dengan regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara parsial bahwa gangguan pribadi (X1) dan gangguan ekstern (X2) berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor (Y).

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut.

1. Gangguan pribadi dan gangguan ekstern merupakan hal yang menentukan tingkat independensi auditor sebab kedua gangguan tersebut dapat mempengaruhi opini yang akan dikeluarkan oleh auditor. Oleh karena itu, instansi BPK sebaiknya mengetahui apakah terdapat indikasi gangguan pribadi dan ekstern kepada auditor sebelum memberikan penugasan.

2. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya memperluas objek penelitian yang tidak terbatas pada auditor di Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan saja tetapi kantor KAP yang lain. Sehingga memungkinkan adanya perbedaan hasil penelitian dan kesimpulan.
3. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya menggunakan observasi atau pengamatan langsung kepada objek.
4. Penelitian ini perlu dikembangkan lebih jauh lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, yaitu dengan menambahkan variabel lain yang mempengaruhi independensi auditor, seperti variabel *reward system*, dll



DAFTAR PUSTAKA

- Amirsyah. 2007. *Gangguan Organisasi dalam Pemeriksaan*. Didownload dari <http://www.amirsyah.com> pada tanggal 14 Maret 2011.
- Amirin, Tatang. 2009. *Populasi dan Sampel Penelitian 3: Pengambilan Sampel dari Populasi Tak Terhingga dan Tak Jelas*. Didownload dari <http://tatangmanguny.wordpress.com/2009/06/30/sampel-sampling-danpopulasi-penelitian-bagian-ii-teknik-sampling-ii/> pada tanggal 5 April 2012.
- Arens, Alvin A dan Loebbecke, James K. 1984. *Solution Manual Auditing: An Integrated Approach Third Edition*. Prentice Hall Inc. Diterjemahkan oleh Marianus Sinaga. 1986. *Auditing Suatu Pendekatan Terpadu Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Boynton, William C., dan Jhonson Raymond, Walter G. Kell. 2001. *Modern Auditing, Seventh Edition*. Jhon Wiley & Sons, Inc. Diterjemahkan oleh Paul A. Rajoe. 2002. *Modern Auditing, Edisi Ketujuh*. Jakarta: Erlangga.
- Fariad, Andi Muhammad. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Auditor (Studi Survei pada KAP Di Makassar)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Feronika dan Wirawan. 2006. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penampilan Akuntan Publik*. Aksioma Jurnal Riset Akuntansi.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2005. *Auditing I (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan) Edisi Kedua (Revisi)*. Yogyakarta: UPP. AMP YKPN.
- Kuntjojo. 2009. *Metodologi Penelitian*. Universitas Nusantara PGRI Kediri. Ludigdo, Unti. 2007. *Paradoks Etika Akuntan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2007.

- Pope, Jeremy. 2000. *Confronting Corruption: The Elements of National Integrity System*. Transparency International. Diterjemahkan oleh Yayasan Obor Indonesia. 2007. Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Santosa, Purbayu Budi dan Ashari. 2005. *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS*. Andi: Yogyakarta.
- Simamora, Henry. 2002. *Auditing I*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Siregar, Iwan Pantas. *Pengaruh Gangguan Pribadi, Eksternal, dan Organisasi terhadap Independensi Pemeriksa (Studi Empiris pada Inspektorat Kabupaten Deli Serdang)*. Universitas Sumatera Utara.
- Suartana, Wayan. 2010. *Akuntansi Keperilakuan*. CV Andi Offset: Yogyakarta
- Sulaiman, Wahid. *Analisis Regresi Menggunakan SPSS*. 2004. Andi: Yogyakarta.
- Supriyono, R.A. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Penampilan Akuntan Publik*. 1988. BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta.
- Wirakusumah, Arifin dan Sukrisno Agus. *Tanya Jawab Praktikum Auditing*. 2003. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia: Jakarta.